

Kajian Spesifikasi Arah Kebijakan Pembangunan Kota Purwokerto

ANWARUDDIN

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
Jl. Prof. DR. H. Bunyamin 993 Purwokerto, 53122. Telp. 0281-628034., Fax. 0281-636992

Purwokerto city in global era progressively have to start to build competitive capabilities among other Kabupaten/ Kota. Purwokerto City have to can identify strength, weakness, opportunity and threat able to be allowed for Purwokerto design in harmony with available potency. Beside that, this city design have to in harmony with public interest of Purwokerto. Specification development studies of Purwokerto City is required to harmonize analysis of SWOT with public interest. So that, in the future urban development can comprehend rationally and democratic by public in local level. The result of purwokerto city analyse indicate that Purwokerto city can be developed as education city, services and commerce city.

Keywords: city development, local resources, specification development, substainable development, triangle of substainability.

Kota Purwokerto sebagai daerah perkotaan yang sudah cukup lama harus mulai mengenali potensi, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada untuk mendapatkan spesifikasi arah pembangunan yang lebih bermakna. Setidaknya ada beberapa alasan mengenai pentingnya analisis tentang spesifikasi arah pembangunan Kota Purwokerto, Pertama, di masa orde baru Kota Purwokerto termasuk dalam sedikit kota yang dijadikan pilot project dalam implementasi Kota Administratif. Kota Purwokerto memang sudah selayaknya bangga dengan posisi ini, namun, disaat otonomi daerah dan skenario politik yang berubah, Kota Purwokerto mungkin salah satu dari wilayah perkotaan yang belum berwujud kota. Ketiadaan status ini seharusnya menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Banyumas untuk membuktikan, bahwa tanpa status kota pun Kota Purwokerto mampu eksis dan menjadi pusat pertumbuhan yang dinamis. Kedua, disaat wilayah Jawa Tengah bagian selatan mulai bergeliat dan muncul beberapa daerah yang tumbuh dengan lebih progresif seperti: Tegal dan Cilacap, maka ini harus dijadikan cambuk bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk lebih agresif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

Dua alasan di atas setidaknya menjadi *warning alarm* bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera menyusun rencana spesifikasi arah pembangunan Kota Purwokerto. Arah pengembangan yang spesifik dibutuhkan untuk selanjutnya diturunkan menjadi kebijakan yang lebih spesifik dalam rencana tindak lanjut atau program kerja yang mendukung usaha pencapaian pengembangan Kota Purwokerto yang lebih dinamis.

Pemerintah kabupaten di era reformasi dapat melakukan hal-hal yang lebih kreatif, inovatif, agresif bahkan revolusioner untuk mengembangkan kabupatennya. Pemerintah Kabupaten Banyumas pun memiliki kans yang serupa. Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan aset yang tidak kalah dengan kabupaten lain, harus mampu menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas mampu untuk melakukan sesuatu yang berbeda untuk memenangi persaingan yang kian sengit. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan Kota Purwokerto menjadi kota yang berdaya saing tinggi. Demi menuju Kota Purwokerto yang berdaya saing tinggi, maka Kota Purwokerto perlu menentukan spesifikasi arah pembangunan kota yang ideal, sehingga diperlukan informasi yang sempurna me-

ngenai profil (kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman) Kota Purwokerto, dan keinginan stakeholder atas pembangunan kota yang ideal di masa yang akan datang. Informasi yang sempurna dapat digunakan untuk merancang model dan kebijakan yang dapat harus diambil oleh pemerintah kabupaten untuk mencapai arah pembangunan kota yang ideal. Sehingga penelitian ini nantinya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu: *Pertama*, bagaimana analisis terhadap potensi, kekurangan, ancaman dan peluang Kota Purwokerto yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan kota yang ideal? *Kedua*, kebijakan-kebijakan apakah yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengembangkan spesifikasi kota yang diharapkan?

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah: a) Mendeskripsikan potensi, kekurangan, ancaman dan peluang yang dimiliki oleh Kota Purwokerto yang dapat dipertimbangkan untuk mengembangkan kota yang ideal; b) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengembangkan spesifikasi kota yang diharapkan.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran secara komprehensif mengenai potensi, kelemahan, peluang dan ancaman yang bermanfaat untuk mengembangkan spesifikasi Kota Purwokerto yang ideal. Temuan dalam penelitian ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas terutama Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA), bagi masyarakat dan bagi *stakeholders*, karena penelitian ini memberikan gambaran secara komprehensif mengenai potensi, kelemahan, peluang dan ancaman yang bermanfaat untuk mengembangkan spesifikasi Kota Purwokerto yang ideal, sehingga, pemerintah dan publik memiliki gambaran yang sama mengenai pengembangan Kota Purwokerto di masa yang akan datang.

Penelitian ini juga mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mengembangkan spesifikasi Kota Purwokerto yang diidamkan. Hasil ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka menentukan kebijakan-kebijakan dan program-program yang tepat untuk mengembangkan Kota Purwokerto. Selain itu,

publik pun diharapkan mampu memahami kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten dalam usaha mencapai tujuan spesifikasi Kota Purwokerto.

METODE

Penelitian Pengembangan Spesifikasi Kota Purwokerto ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini menggunakan metode *rapid district appraisal* (RDA). Mengenai metode RDA, Poppe menyatakan bahwa *rapid appraisal* adalah strategi partisipatif bagi pengumpulan informasi yang dapat memberikan pengetahuan yang cukup tentang ciri khas utama dari suatu daerah berdasarkan mendengar dan belajar (Riyadi. 2004: 71-72). Selain hal tersebut, penelitian kualitatif juga akomodatif terhadap para peneliti dan responden yang diteliti untuk bekerjasama, saling bergantung, dan saling membantu. Hal ini karena metode penelitian kualitatif dapat menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 1999: 5). Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah observasi partisipatori yakni dengan cara berdiskusi dengan orang-orang yang diteliti dan mengajak mereka "meneliti" bersama-sama peneliti tentang pengembangan spesifikasi kota purwokerto, hal-hal yang harus diperhatikan serta kebijakan yang harus ditempuh untuk mencapai derajat pengembangan yang ideal. Cara ini merupakan cara yang tepat untuk menggali, menganalisis, dan selanjutnya menyetengahkan data kualitatif yang bermutu. Hal ini juga sesuai dengan RDA yang membuka diri dengan dialog interaktif dan partisipatif yang dilakukan dengan berbagai unsur di kalangan masyarakat daerah yang hendak dikembangkan. RDA memiliki kecenderungan lebih memilih informasi yang bersifat kualitatif, namun demikian, informasi yang bersifat kuantitatif pun dapat digunakan sepanjang dapat menambah kuat kedalaman analisis dan argumen yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pengembangan kota.

Untuk memberikan nuansa data kualitatif yang kaya, calon peneliti juga memilih situs-situs penelitian dengan menelusuri pihak-pihak yang

dianggap berkompeten untuk memberikan pernyataan tentang fokus penelitian. Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian telah diwawancarai diantaranya: BAPEDA, Organisasi Mahasiswa: HMI dan KAMMI, Koperasi Paguyuban PKL Unsoed/KOPASOED, para pengusaha, Paguyuban Petani, Kelompok Profesi (IDI dan PERADI), Sekcam, Paguyuban Tukang Becak Sokawera, dan Tokoh-tokoh Masyarakat.

HASIL

Kota Purwokerto sebagai Kota Pendidikan

Kota Purwokerto merupakan kota dengan jumlah institusi perguruan tinggi paling banyak di wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan. Tak heran jika Kota Purwokerto mendapatkan julukan sebagai kota pendidikan. Kota Purwokerto menaungi tidak kurang dari 15 perguruan tinggi. Dari sejumlah 15 perguruan tinggi di Purwokerto, tiga besar universitas yang menampung mahasiswa di Kota Purwokerto adalah Universitas Jenderal Soedirman dengan 25.000 mahasiswa, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Selain sebagai lokasi pilihan untuk studi pendidikan tinggi, Kota Purwokerto juga menjadi incaran murid dan wali murid untuk mengenyam taraf pendidikan dasar dan menengah. Hampir seluruh sekolah favorit dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Banyumas ada di Kota Purwokerto.

Selain fasilitas sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi, Kota Purwokerto juga telah memenuhi julukan sebagai kota pendidikan dengan fasilitas perpustakaan dan toko buku. Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas telah dibuka untuk umum. UPT Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas yang terletak di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 85, Purwokerto, memiliki koleksi sejumlah 25 ribu eksemplar yang terdiri dari buku dan referensi, belum termasuk koran dan tabloid, beragam judul dari buku-buku fiksi maupun non fiksi. UPT Perpustakaan juga meminjamkan koleksi langka, Ensiklopedia, undang-undang, dan buku-buku referensi

lainnya. 12 toko buku di Purwokerto juga telah berdiri dan dapat diakses dengan mudah.

Selain itu di Kota Purwokerto juga terdapat fasilitas 25 warnet untuk mempermudah mengakses informasi secara cepat dan akurat. Berdasarkan observasi, seperti di kota-kota besar lainnya, warnet lebih didominasi oleh para mahasiswa, pelajar dan bisnismen. Beberapa warnet ini ada yang hanya menawarkan fasilitas browsing internet saja, namun ada juga yang telah dilengkapi dengan fasilitas game online.

Kota Purwokerto sebagai Pusat Kesehatan

Sebagai ibu kota kabupaten, Kota Purwokerto merupakan kota di bagian Jawa Tengah Bagian Barat Selatan dengan pusat kesehatan yang relatif lebih lengkap jika dibandingkan dengan kota sekitarnya. Tak kurang dari 16 rumah sakit, klinik maupun balai pengobatan baik milik negeri maupun swasta telah berdiri di Purwokerto.

Fasilitas kesehatan yang lengkap di Kota Purwokerto dilengkapi dengan keberadaan apotik-apotik yang tersebar di berbagai penjuru Kota dengan jam buka hingga 24 jam. Sekurangnya terdapat delapan apotik terdapat di Kota Purwokerto, diantaranya:

Transportasi dan Mobilitas Kota Purwokerto

Kelancaran aktivitas dan mobilitas warga kota amat dipengaruhi oleh sistem transportasi yang didesain dan diimplementasikan dengan baik. Kota Purwokerto saat ini memiliki terminal bus tipe A yang merupakan terminal terbesar di Jawa Tengah. Terminal seluas 10 hektar ini diresmikan pada tanggal 6 April 2006 bertepatan dengan Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke 424. Mobilitas warga kota selain didukung oleh terminal yang beroperasi 24 jam, juga disupport oleh dua sub-terminal yang beroperasi hingga pukul 16.00 WIB yaitu: sub terminal Angkutan Kota Kebondalem dan sub-terminal Mikrobus di Karanglewas.

Angkutan Kota Purwokerto juga telah diciptakan dengan jumlah rute dan armada yang cukup banyak, meskipun demikian, analisis tentang kelayakan dan jumlah armada harus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan Kota Purwokerto yang semakin padat. Selain menggunakan angkutan

kota, warga kota juga dapat memanfaatkan jasa taksi, ojek, tukang becak dan andong/delman. Ojek lebih banyak beroperasi di malam hari, sedangkan tukang becak dan andong lebih banyak beroperasi di siang hari dengan jarak tempuh dan skala yang semakin kecil.

Jaringan transportasi Kota Purwokerto dari dan ke luar kota dilakukan oleh kereta api, bus antar kota dalam propinsi (AKDP) dan bus antar kota antar propinsi (AKAP) yang memadai. Kereta api dan Bus-bus tersebut menuju kota-kota besar di Pulau Jawa, diantaranya: Semarang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Surabaya. Selain bus, transportasi Kota Purwokerto dari dan ke luar kota disupport oleh 18 travel dan biro perjalanan.

Pasar-Pasar di Kota Purwokerto

Pada setiap kecamatan di Kota Purwokerto terdapat pasar tradisional, adapun pasar tradisional yang terbesar di Purwokerto adalah Pasar Wage. Meskipun sejak relokasi pedagang dan konsumen di pasar ini terus menurun, namun secara empirik pasar ini tetap menjadi pasar tradisional terbesar di Purwokerto. Beberapa pasar tradisional yang cukup besar adalah Pasar Manis dan Pasar Cireme. Pasar modern terbesar di Kota Purwokerto adalah Moro Hypermarket, bahkan Moro adalah penyumbang retribusi parkir terbesar se Kabupaten Banyumas. Selain Moro, beberapa pasar modern lainnya antara lain: SE, Rita Pasaraya, Tamarasari, Alfa Maret, Indomaret, dan Buaran Market. Pasar modern ini tersebar di penjuru Kota Purwokerto.

Tabel 1. Jumlah prasarana ekonomi per kecamatan tahun 2004

| No | Kecamatan | Pasar | Kel. Pertokoan | Jumlah Penduduk | Rasio Pasar: 10.000 Pddk | Rasio Toko: 10.000 Pddk |
|----|--------------------|-------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | Purwokerto Selatan | 6 | 169 | 63.964 | 0,93773 | 26,41285 |
| 2 | Purwokerto Barat | 5 | 523 | 50.776 | 0,98472 | 103,00142 |
| 3 | Purwokerto Timur | 8 | 1.075 | 64.068 | 1,24867 | 167,79047 |
| 4 | Purwokerto Utara | 1 | 550 | 46.595 | 0,21462 | 118,03842 |

Sumber: diolah dari RPJM Daerah Transisi Kabupaten Banyumas Tahun 2007-2008

Fasilitas Olahraga, Hiburan dan Rekreasi Kota Purwokerto

Warga kota sebagai komunitas yang sibuk membutuhkan ruang dan waktu khusus untuk mele-

pas lelah, beristirahat, dan berolahraga. Untuk olahraga Kota Purwokerto memiliki fasilitas yang relatif lebih lengkap jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain disekitarnya, diantaranya: Padang Golf: Wijaya Kusuma (Jl. Dr Bunyamin Purwokerto, dengan luas 7 Ha), Lapangan Tenis, Kolam Renang, Gelanggang Olahraga. Kota Purwokerto telah menyediakan berbagai tawaran hotel, penginapan, restoran, gedung bioskop, karaoke, diskotik dan billiar dengan berbagai fasilitas.

Perbankan

Warga kota yang dinamis dalam berbisnis akan mendapatkan layanan perbankan yang memadai di Purwokerto. Sedikitnya terdapat 14 lembaga perbankan di Purwokerto, satu diantaranya adalah Bank Indonesia. Selain lembaga perbankan dengan 38 buah baik cabang, kantor kas dan cabang pembantu. Kota Purwokerto juga diramaikan dengan hadirnya lembaga keuangan non perbankan sebanyak 102 lembaga. Ini membuktikan bahwa Kota Purwokerto merupakan kota yang cukup strategis dalam perkembangan ekonomi di Jawa Tengah bagian barat. Untuk menunjang dinamisasi transaksi, di Kota Purwokerto setidaknya terdapat 46 mesin ATM baik tunai maupun non tunai dari berbagai bank. Adapun Jenis ATM, dan Lokasi berdasarkan Bank adalah sebagai berikut:

Kota Purwokerto memiliki fasilitas publik yang lengkap, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, pasar, olahraga, hiburan dan rekreasi, perbankan dan ATM. Kehadiran fasilitas-fasilitas tersebut pada dasarnya telah membuktikan: pertama, Kota Purwokerto merupakan sebuah kota yang mulai berkembang secara dinamis baik secara ekonomi maupun sosial; kedua, Kota Purwokerto memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan dan aktifitas warga kota.

PEMBAHASAN

Arah Kebijakan Pembangunan Kota Purwokerto

Perkembangan kota setidaknya telah lama menjadi kajian yang menarik, paling tidak, kepedulian atas perkembangan kota yang lebih sustainable dimulai sejak tahun 1972 yaitu pada saat Konferensi Bumi di Stockholm, Swedia. Konferensi

ini berhasil menetapkan apa yang dikenal sebagai *brown agenda* yaitu agenda yang mencerminkan keprihatinan dari dampak buruk industrialisasi perkotaan (terutama negara-negara maju) yang menghasilkan polusi air dan udara. Tidak jauh berselang muncul *green agenda* sebagai tindak lanjut dari *brown agenda*, dengan konsentrasi yang lebih meluas, mengikat dan melibatkan individu dan kelembagaan baik di tingkat lokal hingga global baik dalam dimensi perkotaan dan pedesaan beserta jaring-jaring yang terkait dengannya. Sistem pengembangan perkotaan kemudian bergerak dengan sasaran: 1) menghapus kemiskinan, 2) melindungi lingkungan, dan 3) meningkatkan produktivitas perkotaan. Konsep inilah yang dimaksud dengan konsep pengembangan kota yang harus sesuai dengan *triangle of sustainability*, yaitu usaha untuk mengembangkan kota dengan konsentrasi menghapus kemiskinan, melindungi lingkungan serta meningkatkan produktivitas perkotaan (Serageldin dalam Nugroho, 1997: 3-13). Hal ini sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius, sebab, salah satu penyebab konflik yang terjadi antarnegara maupun di dalam negara adalah lahirnya kompetisi karena semakin menipisnya sumber daya alam yang tersedia (Timberlake dan Tinker dalam Hettne, 2001: 325).

Kota Purwokerto berkembang menjadi kota pendidikan. Dua keuntungan besar Purwokerto sebagai Kota Pendidikan adalah pertama, Kota Purwokerto memiliki kesempatan untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja yang handal untuk sektor industri perkotaan. Hal ini amat bermanfaat untuk menciptakan iklim investasi yang baik dengan suplai tenaga profesional yang memadai. Kedua, Kota Purwokerto memiliki kesempatan untuk mendapatkan investor-investor baru dari para alumni perguruan tinggi yang berusaha dan bekerja secara mandiri di Kota Purwokerto. Selain itu, secara ekonomi pemerintahan kabupaten dan masyarakat dapat diuntungkan dengan: pertama, tumbuhnya industri nonformal di pusat-pusat pendidikan, seperti warung makan, warung kelontong, laundry, rental komputer dan penyewaan buku. Kedua, tumbuhnya industri formal yang membangun infrastruktur penunjang pendidikan tinggi sehingga menambah kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan di Kota Purwokerto,

seperti hadirnya warung-warung internet, toko-toko buku dan toko-toko komputer berskala besar.

Seiring dengan perkembangan bisnis dan perdagangan, kehadiran pasar tradisional di Purwokerto mulai disaingi oleh kehadiran pasar-pasar modern yang mulai tumbuh dengan sangat progresif. Kehadiran pasar modern di Kota Purwokerto adalah cerminan berkembangnya usaha jasa yang merupakan salah satu ciri perkotaan. Namun demikian, ada beberapa permasalahan pelik terkait dengan kehadiran pasar modern dan kompetisinya dengan pasar tradisional yang telah lama eksis di Kota Purwokerto, diantaranya: Pertama, beberapa pasar modern memilih lokasi di dekat pasar tradisional (seperti di dekat Pasar Cireme dan Pasar Bancarkembar). Hal ini berimplikasi negatif bagi pasar tradisional yang telah hadir lebih dahulu. Penolakan terhadap kehadiran pasar modern yang baru ini bahkan telah berhasil menutup salah satu pasar yang baru berdiri. Kedua, pasar modern sesuai dengan SK Menperindag No. 10/ MPP/ Kep/2/ 1998 tentang Ketentuan dan tata cara Pemberian IUPM telah mencantumkan bahwa pasar modern baru dibuka mulai pukul 10.00 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB. Fakta yang terjadi adalah pasar modern pada pukul 08.00 WIB telah beroperasi. Ketiga, Franchise secara hukum normatif dilarang untuk membuka lokasi gerai yang saling berdekatan untuk barang/ merek yang sama (Kepmerindag No. 259/ MPP/ Kep/7/1997). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa di Purwokerto Utara, terdapat letak gerai dengan franchise yang sama. Selain permasalahan-permasalahan tersebut, menarik dicermati kehidupan para pemilik usaha kecil dan menengah yang berada di sekitar Pasar Modern. Hal ini menjadi penting karena berdasarkan hasil survei dari Analisis Cost Benefit Kehadiran Pengecer Besar oleh Priyono dkk (2003: 17) menunjukkan 54 persen pengecer kecil di Jawa Barat terutama di Bekasi terjadi penurunan omzet akibat kehadiran pasar modern.

Kota Purwokerto juga berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa. Sektor ini didukung dengan data bahwa di tahun 2006 sektor perbankan tumbuh amat pesat yaitu sebesar 12, 39 persen dengan cabang-cabang lembaga perbankan baru. Hadirnya beberapa cabang baru dari lembaga

perbankan ini menunjukkan bahwa Kota Purwokerto amat strategis untuk investasi dan bisnis. Kehadiran beberapa cabang baru dari lembaga perbankan ini juga melegitimasi bahwa Kota Purwokerto telah tumbuh menjadi kota dengan jasa keuangan.

Kota Purwokerto secara dini harus mempersiapkan diri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada. Sungai-sungai di Purwokerto sampai saat ini masih eksis dan bahkan menjadi salah satu tumpuan aktifitas kota untuk menunaikan hajatnya. Meskipun demikian, beberapa sungai-sungai di Purwokerto sudah mulai mengalami masalah, yaitu ditutup dengan bangunan permanen demi kepentingan usaha dan bisnis, serta pendangkalan karena tumpukan lumpur dan sampah.

Kota Purwokerto dengan demikian juga membutuhkan rencana tata ruang dan wilayah yang dapat mengakomodir spesifikasi arah pembangunan Kota Purwokerto sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan. Hal ini menjadi penting agar Kota Purwokerto dapat tumbuh dan berkembang secara lebih baik, terencana dan lebih integrated.

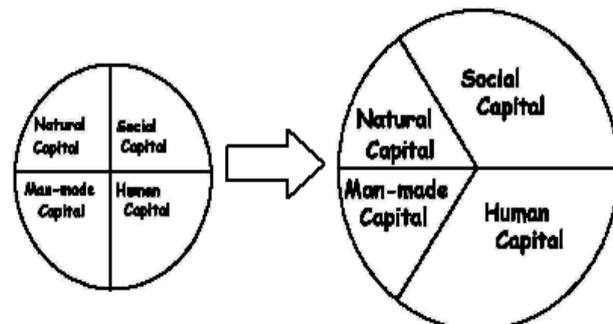
Kemiskinan warga kota sebagaimana layaknya ciri khas perkotaan juga terlihat di Kota Purwokerto. Di ruas-ruas jalan utama yang padat dan ramai terlihat banyak pedagang asongan, pengamen dan peminta-peminta yang nekat berdiri di tengah jalan. Selain itu, para gelandangan dengan amat mudah dapat ditemukan sedang asyik berada di teras di depan toko-toko di beberapa sudut kota. Masalah ini menunjukkan bahwa Kota Purwokerto telah menimbulkan masalah sosial baru, yang harus segera direspon oleh pemerintah kabupaten.

Pengembangan Kota Purwokerto harus dapat mencerminkan pengembangan kota yang mampu menghapus kemiskinan, melestarikan lingkungan dan meningkatkan produktivitasnya (*triangle of sustainability*). Keadaan untuk tumbuh tanpa menghindari kerusakan lingkungan bukanlah hal yang mudah bagi kota-kota yang berada di negara berkembang. Sebab, negara-negara berkembang sangat sulit bila harus memilih antara meningkatkan laju pertumbuhan produksi, melindungi lingkungan dan menghemat sumber daya. Terlebih tawaran industrialisasi yang besar begitu menggiurkan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan (UI Haq,

1983: 125 dan Carley, 1992: 111-112). Babu menyatakan diperlukan peningkatan kapasitas pengambil kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dan sumber daya alam dalam pengambilan kebijakan terutama di negara berkembang (Babu, 2000: 71-76). Oleh karena itu, menjadi relevan jika dalam analisis kebijakan pengembangan Kota Purwokerto juga dipertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Selain hal tersebut, muncul kekhawatiran bahwa hadirnya sentra-sentra produksi baru juga akan menimbulkan *capital accumulation* pada satu kota tertentu dan akan menimbulkan *inequality* secara perlahan-lahan (Stilwell, 1995: 122-127). Sehingga dalam hal menanamkan modal, beberapa hal berikut harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas: *pertama*, tidak menghilangkan hak-hak rakyat terhadap sumber daya alam yang akan dikelola investor; *kedua*, rakyat diikutsertakan dalam proses pengelolaan tersebut; *ketiga*, rakyat memiliki akses untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam (Zenwen Pador dalam Fauzi, 2001: 126).

Hal ini tidak harus disikapi secara pesimistis, sebab pengembangan kota yang pro kepada lingkungan pun mendapatkan pembenaran dari konsep *sustainability as opportunity* yang dikembangkan oleh Bank Dunia. Konsep ini menghendaki *sustainable development* yang memberikan generasi mendatang *income* disertai *opportunity* pertumbuhan *capital* (sama dengan generasi sekarang) yang dapat diperlihatkan dengan relatif lebih tinggi *capital* per kapita dibandingkan dengan generasi sekarang. Gambar berikut menjelaskannya:



Gambar 1. Keberlanjutan dan Kenaikan Ketersediaan Modal Per Kapita

Sumber: Serageldin (1996) sebagaimana dikutip oleh Nugroho, 2004: 224

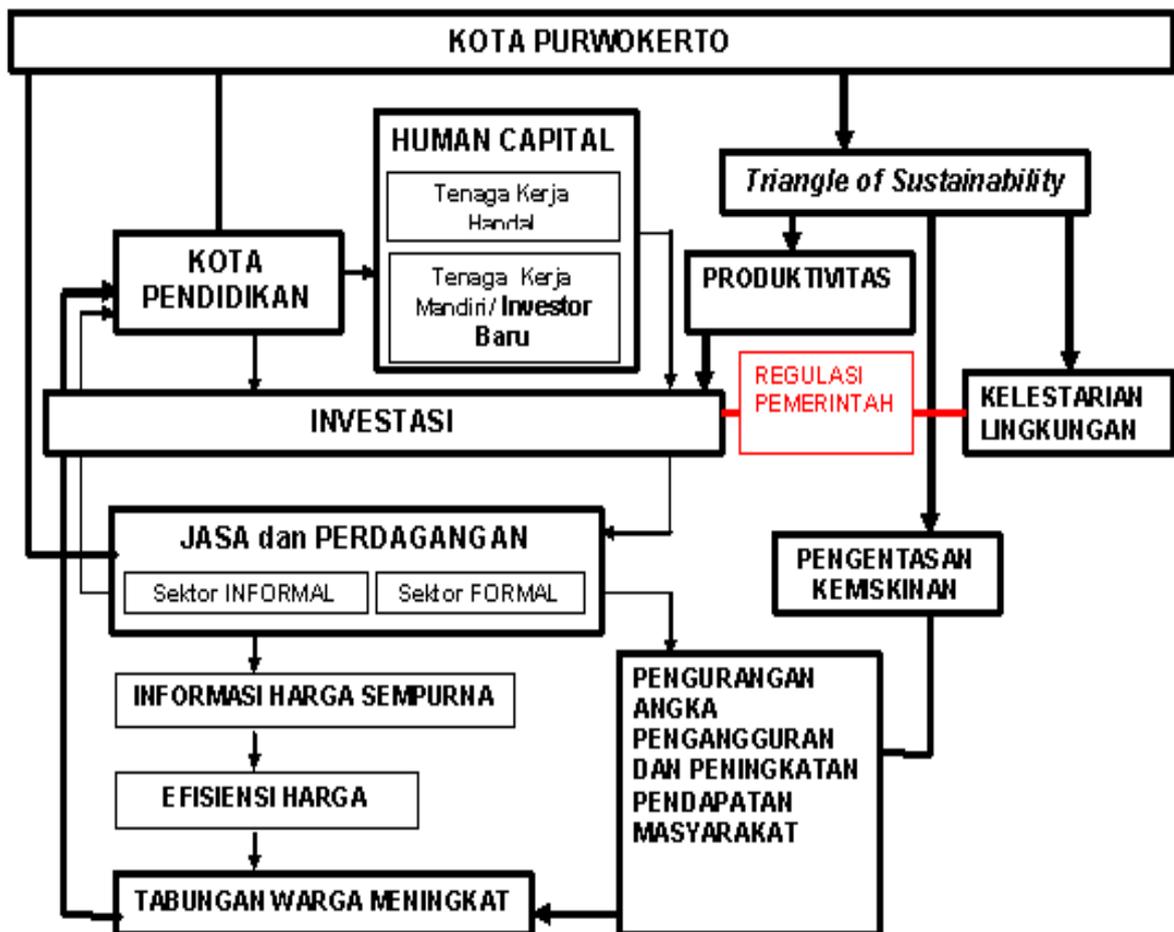
Kajian tentang *capital* di atas selaras dengan pendapat Sharp dalam Kuncoro, 2003:131), yang menunjukkan bahwa penyebab dari kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi adalah, *pertama*, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. *Kedua*, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. *Keempat*, teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*), yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Kota Purwokerto dikembangkan menjadi Kota Pendidikan tersebut sangat selaras dengan konsep pembangunan modal manusia. Selain hal ter-

sebut, pembangunan modal manusia ini dapat menunjang pengembangan Kota Purwokerto sebagai kota perdagangan dan jasa.

Skenario Arah Spesifikasi Pembangunan Kota Purwokerto

Penelitian ini merekomendasikan skenario arah spesifikasi pembangunan Kota Purwokerto sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Perdagangan. Skenario ini harus dilakukan dengan tetap konsisten pada upaya melaksanakan pembangunan kota berlandaskan *triangle of sustainability*, yaitu meningkatkan produktivitas warga kota, mengentaskan kemiskinan dan melindungi kelestarian lingkungan. Skenario ini diharapkan dapat mewujudkan Kota Purwokerto sebagai Kota Satria yang sesungguhnya.

Skenario tersebut dapat dilihat dalam model pada gambar 2, sebagai berikut:



Gambar 2. Model Spesifikasi Arah Pembangunan Kota Purwokerto

Keterangan gambar 2:

- Spesifikasi kota purwokerto harus diarahkan menjadi kota pendidikan, perdagangan dan jasa.
- Kota Purwokerto dengan banyak perguruan tinggi akan menciptakan tenaga kerja handal baik yang akan diserap oleh industri perkotaan maupun menciptakan lapangan kerja baru. Hadirnya perguruan tinggi tersebut secara mendasar telah menciptakan modal manusia yang kuat di Purwokerto dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif akan menciptakan industri perkotaan secara dinamis.
- Selain itu Pemerintah Kabupaten Banyumas harus menciptakan produktifitas yang tinggi warga kota dengan menciptakan regulasi yang memudahkan hadirnya investasi serta menciptakan sistem pertumbuhan investasi yang tetap melestarikan lingkungan Kota Purwokerto. Investasi yang berkembang akan menciptakan lapangan pekerjaan, yang akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan warga kota. Hal ini berarti akan menambah tabungan warga dan dapat diinvestasikan dalam pendidikan.
- Kota Purwokerto dengan banyak perguruan tinggi juga akan menstimulus hadirnya industri formal dan informal di sekitar kampus. Keuntungan yang didapat oleh Industri formal dan informal di sekitar kampus akan diinvestasikan dengan menyekolahkan anak/saudara mereka ke universitas-universitas yang ada di Kota Purwokerto. Tumbuhnya industri perkotaan di sekitar kampus dan Kota Purwokerto akan memberikan jaminan adanya informasi yang sempurna atas harga barang dan jasa dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan terjadinya efisiensi harga. Efisiensi harga warga kota dapat meningkatkan tabungan warga kota, dan ini dapat diinvestasikan dalam sektor pendidikan dengan menyekolahkan anak-anak mereka ke dalam universitas-universitas yang ada di Purwokerto.
- Selain itu Pemerintah juga harus mengembangkan suatu sistem jaminan sosial, berupa program-program pengentasan kemiskinan yang dapat memberdayakan warga miskin kota lebih kuat dan mandiri.

Kota Purwokerto dengan demikian juga membutuhkan rencana tata ruang dan wilayah yang dapat mengakomodir spesifikasi arah pembangunan Kota Purwokerto sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Perdagangan. Hal ini menjadi penting agar Kota Purwokerto dapat tumbuh dan berkembang secara lebih baik, terencana dan lebih integrated. Penyusunan rencana tata ruang dan wilayah -yang selaras dengan spesifikasi arah pengembangan Kota Purwokerto- sebagai suatu kebijakan sudah seharusnya dapat dilakukan secara partisipatif, responsif

dan transparan. Proses pengambilan kebijakan tata ruang yang dilakukan secara partisipatif bermakna bahwa publik diberikan ruang untuk melayangkan aspirasinya tentang pengembangan kota menurut mereka. Salah satu hasil positif dari proses ini adalah pemerintah memiliki bank informasi mengenai kota ideal menurut publik yang dapat digunakan sebagai informasi penting dalam merancang kebijakan kota. Proses Pengambilan kebijakan tata ruang yang dilakukan secara responsif bermakna bahwa proses pengambilan kebijakan harus benar-benar mempertimbangkan suara publik, tanpa meninggalkan aspek idealitas kebijakan pembangunan pemerintah yang telah ditetapkan secara jangka panjang dan berkelanjutan (Blair, 2004: 102-141). Pengambilan kebijakan tata ruang yang dilakukan secara transparan menunjuk proses pengambilan kebijakan benar-benar berlangsung secara terbuka dan jujur. Jika proses-proses ini dapat dilakukan dengan baik maka akan menambah kualitas kebijakan, meningkatkan derajat penerimaan publik atas kebijakan dan meningkatkan derajat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Riege dan Lindsay, 2006: 24-39, Indiahono, 2006: 73-102, Indiahono, 2009: 153-189).

SIMPULAN

Kota Purwokerto dapat dikembangkan secara spesifik menjadi kota pendidikan, jasa dan perdagangan. Fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan di Kota Purwokerto diyakini dapat meningkatkan modal manusia, yang akan berimplikasi pada peningkatan kualitas manusia yang dapat mendukung proses investasi di sektor jasa dan perdagangan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dapat menjaga eksistensi pengembangan kota yang menghapus kemiskinan, melindungi lingkungan serta meningkatkan produktifitas perkotaan adalah a) menciptakan tata ruang dan wilayah Kota Purwokerto yang dapat mendukung implementasi dari spesifikasi arah pembangunan Kota Purwokerto menjadi kota pendidikan, jasa, perdagangan dan *clean industry*; b) menciptakan mekanisme dan prosedur perijinan yang lebih sederhana, jelas dan akurat yang dapat menciptakan iklim investasi yang baik di bidang jasa dan

perdagangan; c) mengevaluasi dan merancang sebuah sistem transportasi dalam kota yang lebih pro kepada daerah pinggir kota (perluasan kota), sehingga iklim investasi lebih merata (pertumbuhan yang pro kepada pemerataan); d) mengevaluasi dan merancang sistem transportasi dalam kota dan luar kota yang lebih nyaman dan memuaskan agar tercipta mobilitas orang dan transaksi ekonomi yang lebih baik sehingga dapat mendukung iklim investasi di Purwokerto; e) memberikan informasi yang sempurna mengenai potensi-potensi bidang dan jasa yang masih terbuka di Purwokerto, dan menawarkan potensi yang ada kepada investor yang ada baik secara domestik, nasional maupun internasional; f) melindungi lingkungan dengan hanya menerima investor yang kooperatif dan memiliki komitmen menjaga kelestarian lingkungan, serta mengevaluasi aktifitas perusahaan yang membahayakan ekosistem kota; g) menciptakan iklim belajar dan tumbuhnya investasi di sektor pendidikan secara lebih baik, dengan tidak menciptakan kebijakan yang disinsentif kepada pertumbuhan sektor pendidikan (misalnya tidak membuat kebijakan retribusi pondokan bagi anak kos). Pemerintah kabupaten juga dapat mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di sektor pendidikan, dengan catatan harus memiliki komitmen untuk menawarkan biaya pendidikan secara wajar. Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi para pelajar dan mahasiswa yang menuntut ilmu di Purwokerto dengan memberantas masalah-masalah sosial yang mengancam proses belajar mengajar, seperti narkoba, pornoaksi dan pornografi.

DAFTAR RUJUKAN

- Babu, Suresh Chandra. 2000. *Capacity strengthening in environmental and natural resource policy analysis: Meeting the changing needs*. *Journal of Environmental Management*, 59, 71–86.
- Blair, Robert. 2004. *Public Participation and Community Development: The Role Of Strategic Planning*. *Public Administration Quarterly*; Spring 2004; 28, 1/2; ABI/INFORM Global . pg. 102-141.
- Carley, Michael and Ian Christie. 1992. *Managing Sustainable Development*. London: Earthscan Publication Ltd.
- Fauzi, Noer, dkk. 2001. *Otonomi Daerah: Sumber Daya Alam - Lingkungan*. Yogyakarta: Laperta Pustaka Utama.
- Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2006. Reformasi: "Birokrasi Amplop": *Mungkinkah?* Yogyakarta: Gava Media.
- 2009. *Public Disobedience: Telaah Penolakan Publik terhadap Kebijakan Pemerintah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003-cetakan ketiga. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nugroho, Iwan. 1997. *Modal Sosial dan Perkembangan Kota*. PRISMA Edisi 6, Juni-Juli 1997. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.
- Priyono, Edi, dkk. 2003. *Laporan Akhir: Analisis Cost-Benefit Kehadiran Pengecer Besar*. AKADEMIKA – Center for Public Policy Analysis bekerjasama dengan Partnership for Economic Growth (PEG) - United States Agency for International Development (USAID).
- Riege, Andreas dan Nicholas Lindsay. 2006. *Knowledge Management in The Public Sector: Stakeholder Partnership in The Public Policy Development*. *Journal Of Knowledge Management* Vol. 10 NO. 3 2006, pp. 24-39, Emerald Group Publishing Limited.
- Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004-cetakan kedua. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi*

Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Stilwell, Frank JB. 1995-reprinted. *Understanding Cities and Region.* Australia: Pluto Press.

Sriyuningsih, Nuniek. 2003. *Makalah: Penelitian yang Berperspektif Gender, pada Pelatihan Metodologi Penelitian Berperspektif Gender.* Lembaga Penelitian, UNSOED, Purwokerto.

Ul Haq, Mahbub. 1983-cetakan pertama. *Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga.* Jakarta: Yayasan Obor.